PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2020

TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020.

Ranwal Renja ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Sukamara sesuai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara, hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada tahun 2020.

Kami menyadari bahwa penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah yang akan digunakan sebagai bahan pendukung dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran, pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terimakasih.

Sukamara, Januari 2020

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara

DONALD SIMANJUNTAK, SE.
NIP. 19631008 199303 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI RENJA BKD TAHUN 2018 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2018 dan Capaian Renstra BKD s.d Tahun 2019 7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan BKD 12
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD 16
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM 19
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM 19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM 28
BAB V PENUTUP 37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra BKD Kabupaten Sukamara s.d Tahun 2019	9
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara	13
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	18
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020	34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 126 ayat (2) menyebutkan bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh BKPSDM Kabupaten Sukamara. Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2020.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara terus berupaya melakukan evaluasi dan perubahan menuju perbaikan. Rencana kerja ini disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik. Rencana Kerja ini merupakan serangkaian rencana program dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh sub unit kerja dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di bidang Kepegawaian dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian. Dengan demikian, maka Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkup Kabupaten Sukamara.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2020, RPJP Provinsi Kalimantan Tengah, RPJPD Kabupaten Sukamara, RPJMD Kabupaten Sukamara, dan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2020 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2020.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Sukamara 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40)
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14)
15. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rencana Kerja ini bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara tahun 2021 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 adalah:

1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 adalah sebagai:

1) Kerangka acuan dalam penyusunan RKA-PD Tahun 2020;
2) Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018;
3) Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;
4) Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
5) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
6) Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu tahun anggaran

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, keterkaitan antara Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan dokumen RKPD dan Renstra.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SOPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SOPD.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Lalu (2018)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2018 dan Perkiraan Tahun 2020 serta Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018- 2023.

Bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2018 dan perkiraan tahun 2020 serta pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2018.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji diseuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta ketentuan

peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berisikan uraian mengenai:

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab III : Tujuan, Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diambil dari tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-2023. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2020.

3.2. Program dan Kegiatan

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV : Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2018 dan Capaian Renstra BKD Sampai dengan Tahun 2019

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara memperoleh dana anggaran sebesar Rp. 5.651.600.421,00. dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 telah direalisasikan sebesar Rp. 4.833.755.483,00 sehingga sisa (saldo) anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.817.844.930,00.

Atas dasar telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara, maka capaian kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara pada tahun 2018 dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Hal yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh bagian yang terdapat di lingkup Badan Kepegawaian Daerah dengan berbagai program dan kegiatan yang ada.

Perbandingan antara anggaran Belanja Langsung pada Renja 2018 dengan APBD 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Uraian	Program	Kegiatan	Anggaran
Renja 2018	8	34	Rp. 6.751.600.421,00
APBD 2018	8	30	Rp. 5.651.600.421,00

Adapun Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.369.267.260,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.083.297.412,00 sehingga tersisa Rp. 285.969.848,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 87,93%.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.282.333.161,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.716.258.071,00 sehingga tersisa Rp. 566.075.090,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 82,75% dengan rincian :

a. Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp.450.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 387.115.000,00 sehingga tersisa Rp. 63.305.000,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 85,95%.

b. Belanja barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.597.913.161,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.130.743.071,00 sehingga tersisa Rp. 467.170.090,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 82,02%.
c. Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp.234.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 232.600.000,00 sehingga tersisa Rp. 1.400.000,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,40%.

Berdasarkan data realisasi tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan atau perbedaan antara apa yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara dengan APBD Tahun 2018. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada beberapa hal, diantaranya:

1) Rasionalisasi anggaran, dimana anggaran pada dokumen renja Tahun 2018 dibuat pada Pertengahan tahun 2017, sedangkan APBD (DPA) dibuat pada akhir tahun 2017 sehingga dimungkinkan adanya perubahan.
2) Penyesuaian berdasarkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BKD TAHUN 2018 DAN PENCAPAIAN RENSTRA BKD s/d Tahun 2019
KABUPATEN SUKAMARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA BKD) Tahun 2023 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**									
4.05	**Kepegawaian**									
4.05.01	**Badan Kepegawaian Daerah**									
4.05.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**20%**	**20%**	**20%**
4.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jasa Penyediaan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Penyediaan jasa perizinan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)	100%	100%	1 tahun (2 unit roda 4, 7 unit Roda 2)	1 tahun (2 unit roda 4, 7 unit Roda 2)	100%	1 tahun (2 unit roda 4, 7 unit Roda 2)	1 tahun (2 unit roda 4, 7 unit Roda 2)	100%
4.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium Pengguna Anggaran dan Barang, Penatausahaan Keuangan dan Barang	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan bahan-bahan dan alat-alat kebersihan kantor	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Perlengkapan alat tulis kantor	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan jasa foto copy dan cetak map/amplop	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan lampu dan komponen listrik lainnya	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jasa Koran dan bahan bacaan lainnya	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan bakar minyak/pelumas mesin potong rumput dan pengisian tabung gas	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan dan minum harian kantor (bagi tenaga honor/kontrak)	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.01.18	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kegiatan (honor daerah)	Jasa Tenaga honor/kontrak, dan perlengkapan ATK	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat koordinasi dalam daerah	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.02	**Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**	**Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik**	**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**20%**	**20%**	**20%**
4.05.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jasa pihak ketiga pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jasa service, penggantian suku cadang dan minyak/pelumas bagi kendaraan dinas	100%	100%	12 bulan (2 unit roda 4, 7 unit Roda 2)	12 bulan (2 unit roda 4, 7 unit Roda 2)	100%	12 bulan (2 unit roda 4, 7 unit Roda 2)	12 bulan (2 unit roda 4, 7 unit Roda 2)	100%
4.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jasa pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kerja kantor	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
4.05.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Capaian ketersediaan penunjang disiplin**	**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**20%**	**20%**	**20%**
4.05.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya	Pakaian dinas kantor	100%	100%	28 stel	28 stel	100%	35 stel	35 stel	100%
4.05.01.04	**Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS**	**Capaian ketersediaan fasilitas administrasi pindah/purna tugas**	**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**20%**	**20%**	**20%**
4.05.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Proses pelayanan/pengurusan administrasi purna tugas bagi PNS	100%	100%	0	0	0	80 orang	80 orang	100%
4.05.01.04.03	Pemindahan tugas PNS	Proses pelayanan/ pengurusan administrasi pindah/ purna tugas bagi PNS	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	
4.05.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Capaian Peningkatan kapasitas Aparatur**	**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**20%**	**20%**	**20%**
4.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan formal	Pengiriman peserta diklat/bimtek/ seminar/ workshop	100%	100%	15 PNS	12 PNS	80%	15 PNS	13 PNS	86,67%
4.05.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Capaian Peningkatan Pegembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**					**20%**	**20%**	**100%**
4.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah	100%					8 Dokumen	8 Dokumen	100%
4.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan laporan keuangan unaudited dan audited	100%					3 Laporan	3 Laporan	100%

4.05.01.29	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Capaian Peningkatan Kapasitas Aparatur**	**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**20%**	**20%**	**20%**
4.05.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Pengiriman peserta diklat Prajabatan bagi CPNS	100%	100%	200 Orang	200 Orang	100%	218 Orang	218 Orang	100%
4.05.01.29.02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Pengiriman peserta diklat kepemimpinan Tingkat III dan IV	100%	100%	2 Peserta PIM Tk. II 2 Peserta PIM Tk. III 20 Peserta PIM Tk. IV	2 Peserta PIM Tk. II 2 Peserta PIM Tk. III 20 Peserta PIM Tk. IV	100%	2 Peserta PIM Tk. II 2 Peserta PIM Tk. III 40 Peserta PIM Tk. IV	2 Peserta PIM Tk. II 2 Peserta PIM Tk. III 40 Peserta PIM Tk. IV	100%
4.05.01.30	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Capaian tingkat pembinaan dan pengembangan aparatur**	**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**20%**	**20%**	**20%**
4.05.01.30.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Seleksi Penerimaan CPNS	100%	100%	200 formasi	247 formasi	100%	200 formasi	196 formasi	100%
4.05.01.30.05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Dokumen data kepegawaian daerah (DUK, Struktur, Data Nominatif)	100%	100%	33 SKPD	33 SKPD	100%	33 SKPD	33 SKPD	100%
4.05.01.30.08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Piagam Satya Lencana bagi PNS Berprestasi	100%	100%	100 PNS	100 PNS	100%	100 PNS	100 PNS	100%
4.05.01.30.11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Bantuan Biaya Tugas Belajar S1 dan S2	100%	100%	1 PNS S1	1 PNS S1	100%	1 PNS S1	1 PNS S1	100%
4.05.01.30.17	Pengisian Struktur dan Organisasi Pemerintah Daerah	Pelantikan Pejabat	100%	100%	300 PNS	9 PNS	3%	300 PNS	93 PNS	31%
4.05.01.30.18	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	SK kenaikan pangkat PNS per periode Kenaikan pangkat	100%	100%	1000 berkas PNS UKP	394 berkas PNS UKP	36,9%	450 berkas PNS UKP	347 berkas PNS UKP	77,11%
4.05.01.30.22	Penyusunan Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rakor Kepegawaian	100%	100%	100 peserta	100 peserta	100%	80 peserta	80 peserta	100%
4.05.01.31	**Program Pembangunan dan Pengembangan Assesmen Center**	**Capaian terpenuhinya jabatan hasil seleksi/Assesmen kompetensi**	**100%**					**20%**	**20%**	**20%**
4.05.01.31.01	Penilaian Kompetensi/Assesmen Kopetensi untuk Penempatan Dalam Jabatan	Pelaksaan assesmen dan Job Fit bagi pejabat pimpinan tinggi pratama	100%					22 Orang	22 Orang	100%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan BKD

Analisa kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan indikator sasaran yang ditetapkan sebagai perjanjian kinerja pejabat eselon II Tahun 2018 ada 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

1. Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi
2. Peserntase Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi
3. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
4. Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN
5. Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
7. Persentase pengelolaan data kepegawaian

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2020 Target Renstra dan proyeksi Tahun 2022-2023 dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	**Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi**		**IKU Esl. II**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**62,19%**	**95%**	**95%**	
	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial		IKU Esl. III	95%	95%	95%	95%	100%	59,26%	95%	95%	
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan		IKU Esl. IV	24	85	15	15	24	48	15	15	
	persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan fungsional		IKU Esl. III	95%	95%	95%	95%	79,99%	86,66%	95%	95%	
	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan		IKU Esl. IV	9	218	19	200	9	218	19	200	
	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis		IKU Esl. IV	15	15	15	15	12	13	15	15	
	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Fungsional		IKU Esl. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Peserntase Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi**		**IKU Esl. II**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**100%**	**95%**	**95%**	
	Persentase pengembangan sumber daya aparatur		IKU Esl. III	95%	95%	95%	95%	100%	100%	95%	95%	
	Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas		IKU Esl. IV	2	1	1	1	2	1	1	1	
	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah		IKU Esl. IV	13	11	-	-	13	11	-	-	
3	**Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi**		**IKU Esl. II**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**88,26%**	**88,27%**	**95%**	**95%**	
	Persentase tingkat Kompetensi aparatur		IKU Esl. III	95%	95%	95%	95%	88,26%	88,27%	95%	95%	

	Jumlah Pejabat yang mengikuti tes psikologis/ assesmen		IKU Esl. IV	-	22	36	40	-	22	36	40	
	Jumlah CPNS pelamar umum, GTT/PTT yang diterima		IKU Esl. IV	247	200	200	200	247	196	200	200	
4	**Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN**		**IKU Esl. II**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**100%**	**95%**	**95%**	
	persentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur		IKU Esl. III	95%	95%	95%	95%	100%	100%	95%	95%	
	Jumlah ASN yang diberikan sanksi pelanggaran		IKU Esl. IV	4	3	-	-	4	3	-	-	
	persentase pelanggaran disiplin aparatur yang ditangani		IKU Esl. III	95%	95%	95%	95%	100%	100%	95%	95%	
	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang selesai ditangani		IKU Esl. IV	4	3	-	-	4	3	-	-	
5	**Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku**		**IKU Esl. II**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**			**95%**	**95%**	
	persentase mutasi, pelantikan, pemrosesan kenaikan pangkat ASN		IKU Esl. III	95%	95%	95%	95%			95%	95%	
	Jumlah keputusan karis dan karsu yang diterbitkan		IKU Esl. IV			-	-			-	-	
	Jumlah keputusan satya lencana yang diterbitkan		IKU Esl. IV	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Mutasi, Inpassing jabatan fungsional umum		IKU Esl. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Mutasi jabatan fungsional tertentu		IKU Esl. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pejabat yang promosi dan mutasi		IKU Esl. IV	9	300	300	300	9	93	300	300	
6	**Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu**		**IKU Esl. II**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**96,74%**	**98,99%**	**95%**	**95%**	
	persentase pensiun dan pemrosesan kenaikan pangkat ASN		IKU Esl. III	95%	95%	95%	95%	96,74%	98,99%	95%	95%	
	Jumlah ASN yang memperoleh keputusan kenaikan pangkat		IKU Esl. IV	420	450	450	450	394	347	450	450	

	Jumlah ASN yang memperoleh keputusan kenaikan pangkat fungsional tertentu		IKU Esl. IV	-	-	-	-			-	-	
	Jumlah keputusan pensiun yang diterbitkan		IKU Esl. IV	33	13	-	-	33	13	-	-	
7	**Persentase pengelolaan data kepegawaian**		**IKU Esl. II**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**100%**	**95%**	**95%**	
	persentase data dan informasi yang valid		IKU Esl. III	95%	95%	95%	95%	100%	100%	95%	95%	
	jumlah data kepegawaian yang diperbaharui di data base		IKU Esl. IV	1748	1960	-	-	1748	1960	-	-	
	jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan		IKU Esl. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Dalam menata Sumberdaya Aparatur, ada beberapa hal uang perlu diperhatikan dengan melakukan identifikasi permalsalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Adapun Isu-isu strategis dan Permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja dan dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara diantaranya :

1) Isu Lingkungan

Isu ini muncul karena adanya indikasi kurangnya Aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas/profesional dan berdisiplin kerja. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

a) Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum memuaskan;
b) Belum adanya sistem aplikasi kepegawaian (SIMPEG) yang mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien;
c) Belum terwujudnya kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewajiban terutama dalam mematuhi jam kerja.
d) Tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan prima namun tidak diimbangi dengan pemberian formasi untuk kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang pensiun didaerah.

2) Isu kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Isu ini muncul karna berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepegawaian yang belum optimal. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

a) Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khusus di bidang kepegawaian;
b) Belum adanya Perbub tentang Anjab dan ABK;
c) Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) belum sesuai dengan kompetensinya *(the right man on the right place).*

3) Isu Insfrastruktur (Pengembangan Sarana dan Prasarana)

Isu Insfrastruktur terkait dengan belum optimalnya Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan manajemen kepegawaian. Isu-isu yang teridentifikasi adalah:

a) Belum mempunyai sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang mandiri;
b) Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai
c) Pola pengawasan yang belum diimbangi dengan reward bagi ASN.

4) Isu Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Isu ini terkait dengan mewujudkan ASN yang profesional dan peningkatan kinerja ASN. Isu yang teridentifikasi adalah :

a) Pelaksanaan Assesmen/lelang terbuka jabatan;
b) Belum optimalnya Pendidikan dan pelatihan teknis bagi ASN;
c) Belum optimalnya penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN;
d) Belum terintegrasinya indikator pengembangan Aparatur pemerintah dengan sistem penilaian kinerja pemerintah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	95%	200.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	95%	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	95%	2.500.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	95%	
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	95%	1.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	95%	
			Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN	95%	250.000			Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN	95%	
			Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	95%	500.000			Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	95%	
			persentase Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	95%	80.000			persentase Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	95%	
			Persentase pengelolaan data kepegawaian	95%	300.000			Persentase pengelolaan data kepegawaian	95%	
4	Pembangunan dan Pengembangan Assesmen Center		persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	95%	1.500.000	Pembangunan dan Pengembangan Assesmen Center		persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	95%	
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	95%	1.600.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	95%	
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	95%	800.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	95%	
7	Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan disiplin aparatur	95%	50.000	Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan disiplin aparatur	95%	
8	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS		Persentase fasilitasi terhadap proses administrasi pindah /purna tugas PNS	95%	160.000	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS		Persentase fasilitasi terhadap proses administrasi pindah /purna tugas PNS	95%	
9	Peningkatan/pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja aparatur		Terpenuhinya Dokumen perencanaan, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	95%	100.000	Peningkatan/pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja aparatur		Terpenuhinya Dokumen perencanaan, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	95%	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro Pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemeiintah daerah adalah telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana kebijakan nasional mengarah pada reformasi birokrasi secara sistemik yang mencakup perbaikan kelembagaan, ketataksanaan hingga sumberdaya birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari struktur hingga mindset serta kultur birokrasi. Agenda reformasi birokrasi bertujuan melaksanakan Pembangunan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Peningkatan kualitas SDM ASN dan peningkatan pelayanan publik. Dengan komitmen reformasi birokrasi ditingkat daerah akan terwujud pengembangan birokrasi yang modem bersih dan beritegritas, profesional dan berkineija tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKSDM

Mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara maka salah satu tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Sukamara adalah meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Terkait dengan penjabaran tujuan dan sasaran daerah tersebut, maka rumusan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

1. **Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi**

   Dengan penetapan sasaran :

   a) **Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara (ASN);**

      Dalam rangka mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan kompetitif dilaksanakan melalui Pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural, teknis dan fungsional serta prajabatan bagi calon ASN dan juga dengan adanya tugas belajar, izin belajar dan ujian dinas untuk meningkatkan pengetahuan aparatur, agar terwujud pelayanan publik yang baik bagi aparatur di daerah.

      Sebagai indikator keberhasilan capaian sasaran adalah :

      1) Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi;
      2) Persentase Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

   b) **Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi;**

      Reformasi birokrasi membawa dampak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi harapan masyarakat sekaligus menumbuhkan sikap kritis terhadap kinerja birokrasi. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut salah satu yang dilakukan adalah pegawai mengikuti tes phisikologi dan assesment sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan untuk penataan calon pejabat yang berkualitas dan berkompetensi. Sasaran ini juga ditetapkan untuk memenuhi kekurangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang pensiun setiap tahunnya, walaupun pemenuhan target ini bergantung kepada kebijakan pemerintah pusat untuk penerimaan pegawai baru, tetapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara tetap mengusulkan kebutuhan pegawai kepada Pemerintah Pusat.

Sebagai indikator keberhasilan capaian sasaran adalah :

1) Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi.

c) Meningkatnya disiplin ASN

Sasaran ini ditetapkan untuk memproses setiap kasus pelanggaran disiplin yang terjadi dan pemberian sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku sehingga diharapkan akan terjadi penurunan setiap tahunnya.

Sebagai indikator keberhasilan capaian sasaran adalah :

1) persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN.

2. Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN

Dengan penetapan sasaran :

a) Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN

Sasaran ditetapkan untuk memproses administrasi kepegawaian untuk usulan pegawai yang pensiun, pengurusan karis/karsu dan usulan penghargaan satya lencana.

Sebagai indikator keberhasilan capaian sasaran adalah :

1) persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

Dengan penetapan sasaran :

sasaran ini ditetapkan untuk update data kepegawaian dalam jaringan system kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan pejabat pembina kepegawaian dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian. Adapun sasaran tersebut diantaranya :

a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian;

Sebagai indikator keberhasilan capaian sasaran adalah :

1) Persentase Pelayanan Adminisntrasi Perkantoran
2) Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur
3) Presentase peningkatan disiplin aparatur

4) Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu;

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satu diantaranya adalah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas sehingga dapat dihasilkan kinerja yang optimal. Salah satu faktor pendukungnya adalah pemenuhan atas sarana dan prasarana pelayanan.

b) Tersedianya akurasi data kepegawaian.

Sebagai indikator keberhasilan capaian sasaran adalah ;

1) Persentase pengelolaan data kepegawaian.

4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dengan penetapan sasaran :

a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka pemenuhan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Sebagai indikator keberhasilan capaian sasaran adalah ;

1) Nilai Evaluasi AKIP
2) Persentase temuan BPK/Inspektorat yang di tindaklanjuti

3.3. Program dan Kegiatan

A. Program Rutin/Pendukung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara terdiri dari :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Program Wajib Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara terdiri dari :

1. Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4. Program Pembangunan Dan Pengembangan Assesmen Center

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (oulput) dalam bentuk barang/jasa.

a. Kegiatan Rutin/Pendukung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 terinci sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2) Penyediaan jada pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
4) Penyediaan jada kebersihan kantor
5) Penyediaan alat tulis kantor
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9) Penyediaan bahan logistik kantor
10) Penyediaan makanan dan minuman
11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12) Penyedia jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan (honor daerah)
13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
14) Pembangunan gedung kantor
15) Pengadaan peralatan gedung kantor

16) Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor
17) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
20) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
21) Pendidikan dan Pelatihan Formal
22) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
23) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

b. Kegiatan Wajib Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 terinci sebagai berikut :

1) Pemulangan pegawai yang pensiun
2) Pemindahan Tugas PNS
3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
4) Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah
5) Seleksi Penerimaan CPNS
6) Penempatan PNS
7) Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
8) Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
9) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
10) Pengisian Struktur dan Organisasi Pemerintah Daerah
11) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
12) Sumpah Janji CPNS
13) Penyusunan Laporan Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur
14) Penilaian kompetensi/assesmen kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

Penyajian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara sebagaimana tabel 3.1.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Sukamara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Daya		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.05.01.01	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**			**1.227.777.200**				**1.600.000.000**
4.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Telepon, Internet kantor, Air dan Listrik Kantor	BKD	1 Tahun	78.000.000	APBD		1 Tahun	70.000.000
4.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana pembayaran pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 dan Roda 4	BKD	2 Roda 4 dan 7 Roda 2	3.750.000	APBD		3 Roda 4 dan 7 Roda 2	5.000.000
4.05.01.01.07	Penyesiaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS	BKD	1 Tahun	140.165.000	APBD		1 Tahun	150.000.000
4.05.01.01.08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya Bahan-bahan dan Alat alat Kebersihan Kantor	BKD	1 Tahun	22.000.000	APBD		1 Tahun	30.000.000
4.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Kantor	BKD	1 Tahun	40.000.000	APBD		1 Tahun	50.000.000
4.05.01.01.11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	BKD	1 Tahun	53.240.000	APBD		1 Tahun	75.000.000
4.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BKD	1 Tahun	10.000.000	APBD		1 Tahun	20.000.000
4.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, koran dan majalah	BKD	1 Tahun	15.840.000	APBD		1 Tahun	20.000.000
4.05.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	BKD	1 Tahun	8.630.000	APBD		1 Tahun	15.000.000
4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (Rapat dan Tamu)	BKD	1 Tahun	55.345.000	APBD		1 Tahun	60.000.000
4.05.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi	BKD	1 Tahun	600.000.000	APBD		1 Tahun	865.000.000
4.05.01.01.19	Penyedia jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan (honor daerah)	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan (honor daerah)	BKD	1 Tahun	170.807.200	APBD		1 Tahun	200.000.000

4.05.01.01.20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	BKD	1 Tahun	30.000.000	APBD		1 Tahun	40.000.000
4.05.01.02	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur**			**702.680.000**				**800.000.000**
4.05.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	BKD	100%	218.500.000	APBD		100%	370.000.000
4.05.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor	BKD	1	350.000.000	APBD		4 Unit Roda 2	-
4.05.01.02.09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	BKD	100%	285.100.000	APBD		100%	150.000.000
4.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan sarana perlengkapan kantor	BKD	1 Tahun	17.350.000	APBD		1 Tahun	30.000.000
4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Suku Cadang, Bahan Bakar dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	BKD	3 Roda 4 dan 7 Roda 2	104.880.000	APBD		3 Roda 4 dan 7 Roda 2	150.000.000
4.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	BKD	1 Tahun	76.850.000	APBD		1 Tahun	100.000.000
4.05.01.03	**Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase peningkatan disiplin aparatur**			**25.200.000**				**50.000.000**
4.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur	BKD	28 Stel	25.200.000	APBD		35 Stel	50.000.000
4.05.01.04	**Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS**	**Persentase fasilitasi terhadap proses administrasi pindah /purna tugas PNS**			**139.025.000**				**160.000.000**
4.05.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Terlaksananya kegiatan sosialisasi terkait aturan pensiun terbaru	BKD	80 orang	86.625.000	APBD		95%	100.000.000
4.05.01.04.03	Pemindahan Tugas PNS	Proses Administrasi bantuan pindah PNS	BKD	1 Tahun	52.400.000	APBD		95%	60.000.000
4.05.01.06	**Peningkatan/pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja aparatur**	**Capaian Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**33.100.000**				**150.000.000**
4.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen SAKIP	BKD	8	26.400.000	APBD		8	75.000.000
4.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir	BKD	3	6.700.000	APBD		3	75.000.000
4.05.01.05	**Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur**			**200.000.000**				**200.000.000**
4.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terfasilitasinya Aparatur Untuk mengikuti Bimtek/ Pelatihan/Kursus	BKD	15 PNS	200.000.000	APBD		15 PNS	200.000.000
4.05.01.29	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur**			**2.565.582.000**				**2.500.000.000**
4.05.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	BKD	200 Peserta	1.324.982.000	APBD		200 Peserta	1.000.000.000

4.05.01.29.02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM Tk. III dan IV	BKD	15 Peserta	1.240.600.000	APBD		15 Peserta	1.500.000.000
4.05.01.30	**Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Persentase Pengembangan Aparatur**			**1.262.085.000**				**2.130.000.000**
4.05.01.30.02	Seleksi Penerimaan CPNS Daerah	Jumlah Pelamar CPNS sesuai Kompetensi dan Formasi	BKD	200 Formasi	523.860.000	APBD		200 Formasi	800.000.000
4.05.01.30.05	Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terselesaikanya proses pembaruan data pegawai dan pengembangan sistem kepegawaian	BKD	33 SOPD	239.875.000	APBD		33 SOPD	300.000.000
4.05.01.30.08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terselesaikanya proses administrasi dan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	BKD	100 Peserta	82.580.000	APBD		100 Peserta	150.000.000
4.05.01.30.11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terselesaikanya proses administrasi Pemberian Bantuan Tugas Belajar bagi PNS	BKD	1 PNS S1	63.300.000	APBD		2 PNS S1	80.000.000
4.05.01.30.14	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Persentase Terselesaikanya penanganan kasus pelanggaran disipin	BKD	95%	0	APBD		95%	100.000.000
4.05.01.30.17	Pengisian Struktur dan Organisasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengisian Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dan Sumber Daya Manusia yang tepat dan Profesional	BKD	300 Peserta	142.900.000	APBD		300 Peserta	200.000.000
4.05.01.30.18	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	Terselesaikannya proses Kenaikan Pangkat yang tepat waktu	BKD	450 Berkas UKP	105.260.000	APBD		450 Berkas UKP	150.000.000
4.05.01.30.21	Sumpah Janji PNS	Terlaksananya Sumpah janji pengangkatan PNS	BKD	100 Peserta	31.700.000	APBD		200 Peserta	50.000.000
4.05.01.30.22	Penyusunan Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terselesaikanya laporan dan evaluasi kinerja aparatur	BKD	80 PNS	72.610.000	APBD		95%	150.000.000
4.05.01.30.23	Penataan Sistem administrasi pengurusan pensiun otomatis	Terselesaikannya proses pensiun yang tepat waktu	BKD	10 Berkas Pensiun	0	APBD		10 Berkas Pensiun	150.000.000
4.05.01.31	**Pembangunan dan Pengembangan Assesmen Center**	**Persentase pelaksanaan asesmen kompetensi**			**775.100.000**				**1.000.000.000**
4.05.01.31.01	Penilaian Kompetensi/ Assesmen Kompetensi untuk penempatan dalam jabatan	Jumlah Pejabat yang mengikuti Assesmen kompetensi	BKD	22 Peserta	775.100.000	APBD		40 Peserta	1.000.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

4.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan, diantaranya :

1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Listrik dan Belanja Kawat/faximili/internet/intranet/Tv Kabel/TV Satelit.
2. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (pajak kendaraan).
3. **Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PNS, Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Honorarium/Upah Non PNS, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor dan Belanja Jasa Transaksi Keuangan.
4. **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, dan Belanja Bahan Kimia.
5. **Penyediaan Alat Tulis Kantor**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor.
6. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Bahan/Perlengkapan Perlombaan/ Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya, Belanja Cetak dan Belanja Penggandaan.
7. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering).

8. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Surat Kabar/Majalah.
9. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Belanja Pengisian Tabung Gas.
10. **Penyediaan Makanan dan Minuman**
    Kegiatan ini terdiri dari Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Makanan dan Minuman Tamu.
11. **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah**
    Kegiatan ini terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
12. **Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)**
    Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Asuransi Jaminan Kematian (JKM), Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Belanja Penggandaan.
13. **Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah**
    Kegiatan ini terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 5 (lima) kegiatan, diantaranya :

1. **Pembangunan Gedung Kantor**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Modal Kendaraan Dinas
2. **Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah.
3. **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Aset Ekstracompatable, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rak Besi/Metal, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Dapur, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer, serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer.
4. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**
   Kegiatan ini terdiri dari Honorarium/Upah PNS, Belanja Bahan/ Perlengkapan Perlombaan/ Pelatihan/ Pameran dan Kegiatan

Lainnya, Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

5. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas.
6. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH).

IV. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS :

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. **Pemulangan Pegawai yang pensiun/Purna Tugas PNS**
   Kegiatan ini terdiri dari honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS, Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Bahan/Perlengkapan Perlombaan/ Pelatihan/ Pameran dan Kegiatan Lainnya, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta, Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuma Pelatihan/Sosialisasi
2. **Pemindahan Tugas PNS**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium/Upah PNS, dan Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah.

V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan, diantaranya :

1. **Pendidikan dan Pelatihan Formal**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.

VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan diantaranya :

1. **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honoarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS, Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Uang Lembur PNS dan Belanja Penggandaan
2. **Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS, Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Uang Lembur PNS, dan Belanja Penggandaan

VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan, diantaranya :

1. **Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
2. **Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.

VIII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur :

Program pembinaan dan pengembangan aparatur terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, diantaranya :

1. **Seleksi Penerimaan Calon PNS**
   Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS, Honorarium/Upah PNS, Belanja Bahan/ Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/ Pameran dan Kegiatan Lainnya, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta, Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Lainnya.
2. **Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah**
   Kegiatan ini terdiri dari dari Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS, Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Penggandaan.
3. **Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS, Honorarium/Upah PNS, Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Bahan/Perlengkapan

Perlombaan/ Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta, Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Belanja Makan dan Minum Lainnya.

4. **Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Penggandaan, dan Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1.
5. **Pengisian Struktural dan Organisasi Pemerintah Daerah**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS, Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Bahan/Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/ Pameran dan Kegiatan Lainnya, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makan dan Minum Lainnya.
6. **Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS, Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Penggandaan.
7. **Sumpah Janji PNS**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS, Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Bahan/Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/ Pameran dan Kegiatan Lainnya, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makan dan Minum Lainnya.
8. **Penyusunan Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS, Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Bahan/ Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta, Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman pelatihan/Sosialisasi.

IX. Program Pembangunan dan Pengembangan Assesmen center

Program pembangunan dan pengembangan assesmen center terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. **Penilaian Kompetensi / Assesmen Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan**
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS, Belanja Honorarium/Upah PNS, Belanja Bahan/Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/ Pameran dan Kegiatan Lainnya, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja Transportasi

dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta, Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makan dan Minum Lainnya.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Daya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.05.01.01	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**			**1.227.777.200**	
4.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Telepon, Internet kantor, Air dan Listrik Kantor	BKD	1 Tahun	78.000.000	APBD
4.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana pembayaran pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 dan Roda 4	BKD	2 Roda 4 dan 7 Roda 2	3.750.000	APBD
4.05.01.01.07	Penyesiaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS	BKD	1 Tahun	140.165.000	APBD
4.05.01.01.08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya Bahan-bahan dan Alat alat Kebersihan Kantor	BKD	1 Tahun	22.000.000	APBD
4.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Kantor	BKD	1 Tahun	40.000.000	APBD
4.05.01.01.11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	BKD	1 Tahun	53.240.000	APBD
4.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BKD	1 Tahun	10.000.000	APBD
4.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, koran dan majalah	BKD	1 Tahun	15.840.000	APBD
4.05.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	BKD	1 Tahun	8.630.000	APBD
4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (Rapat dan Tamu)	BKD	1 Tahun	55.345.000	APBD
4.05.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi	BKD	1 Tahun	600.000.000	APBD
4.05.01.01.19	Penyedia jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan (honor daerah)	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan (honor daerah)	BKD	1 Tahun	170.807.200	APBD
4.05.01.01.20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	BKD	1 Tahun	30.000.000	APBD
4.05.01.02	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur**			**702.680.000**	
4.05.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	BKD	100%	218.500.000	APBD

4.05.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor	BKD	1	350.000.000	APBD
4.05.01.02.09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	BKD	100%	285.100.000	APBD
4.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan sarana perlengkapan kantor	BKD	1 Tahun	17.350.000	APBD
4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Suku Cadang, Bahan Bakar dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	BKD	3 Roda 4 dan 7 Roda 2	104.880.000	APBD
4.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	BKD	1 Tahun	76.850.000	APBD
4.05.01.03	**Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase peningkatan disiplin aparatur**			**25.200.000**	
4.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur	BKD	28 Stel	25.200.000	APBD
4.05.01.04	**Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS**	**Persentase fasilitasi terhadap proses administrasi pindah /purna tugas PNS**			**139.025.000**	
4.05.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Terlaksananya kegiatan sosialisasi terkait aturan pensiun terbaru	BKD	80 orang	86.625.000	APBD
4.05.01.04.03	Pemindahan Tugas PNS	Proses Administrasi bantuan pindah PNS	BKD	1 Tahun	52.400.000	APBD
4.05.01.06	**Peningkatan/pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja aparatur**	**Capaian Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**33.100.000**	
4.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen SAKIP	BKD	8	26.400.000	APBD
4.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir	BKD	3	6.700.000	APBD
4.05.01.05	**Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur**			**200.000.000**	
4.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terfasilitasinya Aparatur Untuk mengikuti Bimtek/ Pelatihan/Kursus	BKD	15 PNS	200.000.000	APBD
4.05.01.29	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur**			**2.565.582.000**	
4.05.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	BKD	200 Peserta	1.324.982.000	APBD
4.05.01.29.02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM Tk. III dan IV	BKD	15 Peserta	1.240.600.000	APBD
4.05.01.30	**Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Persentase Pengembangan Aparatur**			**1.262.085.000**	
4.05.01.30.02	Seleksi Penerimaan CPNS Daerah	Jumlah Pelamar CPNS sesuai Kompetensi dan Formasi	BKD	200 Formasi	523.860.000	APBD
4.05.01.30.05	Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terselesaikanya proses pembaruan data pegawai dan pengembangan sistem kepegawaian	BKD	33 SOPD	239.875.000	APBD
4.05.01.30.08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terselesaikanya proses administrasi dan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	BKD	100 Peserta	82.580.000	APBD
4.05.01.30.11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terselesaikanya proses administrasi Pemberian Bantuan Tugas Belajar bagi PNS	BKD	1 PNS S1	63.300.000	APBD

4.05.01.30.14	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Persentase Terselesaikanya penanganan kasus pelanggaran disipin	BKD	95%	0	APBD
4.05.01.30.17	Pengisian Struktur dan Organisasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengisian Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dan Sumber Daya Manusia yang tepat dan Profesional	BKD	300 Peserta	142.900.000	APBD
4.05.01.30.18	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	Terselesaikannya proses Kenaikan Pangkat yang tepat waktu	BKD	450 Berkas UKP	105.260.000	APBD
4.05.01.30.21	Sumpah Janji PNS	Terlaksananya Sumpah janji pengangkatan PNS	BKD	100 Peserta	31.700.000	APBD
4.05.01.30.22	Penyusunan Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terselesaikanya laporan dan evaluasi kinerja aparatur	BKD	80 PNS	72.610.000	APBD
4.05.01.30.23	Penataan Sistem administrasi pengurusan pensiun otomatis	Terselesaikannya proses pensiun yang tepat waktu	BKD	10 Berkas Pensiun	0	APBD
4.05.01.31	**Pembangunan dan Pengembangan Assesmen Center**	**Persentase pelaksanaan asesmen kompetensi**			**775.100.000**	
4.05.01.31.01	Penilaian Kompetensi/ Assesmen Kompetensi untuk penempatan dalam jabatan	Jumlah Pejabat yang mengikuti Assesmen kompetensi	BKD	22 Peserta	775.100.000	APBD

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan peningkatan pelayanan publik di daerah maka perlu dilakukan reformasi birokrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih berkeadilan, dan demokratis. Sejalan dengan hal tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara memiliki tujuan yaitu Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian dengan sasaran peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur serta peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Hal ini akan dicapai melalui program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program keija Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara selama Tahun 2020, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta pelayan masyarakat yang terbaik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan mendasar pada pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan.

Sukamara, Januari 2020

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukamara

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
BKPSDM

DONALD SIMANJUNTAK, SE.
NIP. 19631008 199303 1 009